



**KONFLIK POLITIK ANTARA ANGKATAN DARAT DPRS DAN SUKARNO:  
STUDI KASUS PERISTIWA 17 OKTOBER 1952**

**(Political Conflict between the DPRS Army and Sukarno: Case Study of the October 17,  
1952)**

**Abdul Haris Fatgehipon**

Universitas Negeri Jakarta, Indonesia

Jl. R.Mangun Muka Raya, RT.11/RW.14, Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta  
Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13220

[risfatgehipon@gmail.com](mailto:risfatgehipon@gmail.com)

(Diterima: 15 April; Direvisi 18 April; Disetujui: 20 April 2020)

**Abstract**

*This study examines the conflict that occurred after the 1945 Independence Revolution between the Army, the Provisional Representative Council (DPRS) and President Sukarno. The Indonesian Armed Forces after the independence revolution did not only play a role in the defense field. Army officers feel the duty of the army is not only to take care of defense issues but also to guard, oversee the implementation of good state government. The methodology of this research is historiography, the writer gets primary sources from national archives, and secondary sources of researchers get from various library references (Center for Strategic and International Studies (CSIS) and UGM Library. Towards the 1955 Election the army has a very strong influence, the army has the right In the 1955 general election, the army (AD) had a territorial organizational structure from the central to the village level, and political parties scrambled to embrace the army in order to strengthen the position of political parties ahead of the 1955 general election. from the PNI they always threshed the army and the Minister of Defense in every meeting with the DPRS. The army saw many DPRS interfering in the internal affairs of the army. In October 17, 1952, Colonel AH Nasution's army, put pressure on President Sukarno to dissolve the DPRS and carry out the election general training as soon as possible.*

**Keywords:** TNI, Parliamentary Conflict and Sukarno

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji tentang konflik yang terjadi selepas Revolusi Kemerdekaan 1945 antara Angkatan Darat, Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) dan Presiden Sukarno. TNI Angkatan Darat selepas revolusi kemerdekaan tidak hanya berperan dalam bidang pertahanan. Perwira TNI Angkatan Darat merasa tugas tentara tidak hanya mengurus masalah pertahan tetapi juga menjaga, mengawal pelaksanaan pemerintahan negara secara baik. Metodologi penelitian ini adalah historiografi, penulis mendapat sumber primer dari arsip nasional, dan sumber sekunder peneliti dapatkan dari berbagai referensi perpustakaan (Center for Strategic and International Studies (CSIS) dan Perpustakaan UGM. Menjelang Pemilu 1955 tentara memiliki pengaruh yang sangat kuat, tentara memiliki hak pilih pada Pemilu 1955, tentara (AD) memiliki struktur organisasi teritorial dari pusat sampai pada tingkat desa. Partai politik saling berebut merangkul tentara guna memperkuat posisi partai politik menjelang pemilihan umum 1955. Partai PNI, menilai tentara telah dikendalikan oleh Partai Sosialis Indonesia, anggota parlemen dari PNI selalu mengkirik tentara dan Menteri Pertahanan dalam setiap rapat dengan DPRS. Tentara melihat DPRS banyak yang mencampuri urusan internal tentara. Dalam peristiwa 17 Oktober 1952, tentara kelompok Kolonel AH Nasution, melakukan tekanan kepada Presiden Sukarno untuk membubarkan DPRS dan melaksanakan pemilihan umum secepatnya.*

**Kata kunci:** TNI, Konflik Parlemen dan Sukarno

## PENDAHULUAN

Kemerdekaan Indonesia, di Proklamasikan oleh para tokoh pergerakan nasional yang umumnya berpendidikan Eropa Barat, TNI lahir selepas proklamasi kemerdekaan Indonesia, sejarawan militer Salim Said menyatakan tentara di Indonesia melahirkan dirinya sendiri. Pendapat Salim Said mungkin ada benarnya, tetapi perlu diingat, pemerintahan Sukarno Hatta turut andil dalam melahirkan TNI (Atno & Utama, 2018). Presiden Sukarno yang melantik Jenderal Sudirman sebagai Panglima TNI. Para pendiri negara yang umumnya dipengaruhi oleh sistem politik Eropa Barat, berupaya menempatkan tentara di bawa supremasi sipil. Dalam Undang Undang Dasar 1945 di rumuskan **Pasal 10** Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Makna dari pasal 10 bahwa Presiden, sebagai unsur sipil memegang kuasa atas militer, tentara dalam konstitusi Indonesia ditempatkan dibawa supremasi sipil.

Tentara di Indonesia dibentuk dari berbagai unsur yang berbeda beda, ada yang berlatar belakang bekas tentara KNIL, PETA dan unsur Laskar Islam, nasional dan Paguyuban kedaerahan. Tentara yang berlatar belakang KNIL (*Koninklijk Nederlands-Indisch Leger*), sangat dipengaruhi oleh budaya dan pendidikan militer Eropa Barat yang profesional. Tentara yang berlatar belakang PETA, sangat dipengaruhi oleh oleh nilai nilai kesatria Jepang dengan semangat bosido, sedangkan laskar di pengaruhi oleh unsur organisasi yang menjadi induk dari laskar tersebut (Suwito dkk, 2008).

Selepas Indonesia merdeka, pemerintah diperhadapkan dengan berbagai masalah, masalah keamanan nasional, masalah ekonomi. Pemerintah berupaya melakukan efisiensi anggaran pertahanan dengan cara melakukan rasionalisasi jumlah anggota TNI, tentara yang tidak memenuhi standar kualitas profesional diberhentikan dari dinas

ketentaraa, prajurit TNI diarahkan menjadi tentara yang profesional sebagaimana negara negara Eropa Barat. Program rasionalisasi ini di tentang oleh tentara yang berlatar belakang PETA dan Laskar. Perwira tentara yang berasal dari PETA seperi Kolonel Bambang Sugeng, menilai rasionalisasi dan profesional hanya mnguntungkan tentara yang berasal dari KNIL. Konflik yang muncul dalam internal tentera menyebabkan tentara tidak dapat menjaga otonominya dari campurtangan pihak luar (partai politik, pemerintah) (Fathurrohman, 2018).

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah historiografi, penulis mendapatkan sumber data primer berupa dokumen, dan refrensi bacaan yang berkaitan dengan topik diatas. Data primer berupa dokumen penulis dapatkan di Lembaga CSIS (*Centre for Strategic and International Studies*), Perustakaan FISIP UGM (Bangun, 2017).

## PEMBAHASAN

Perubahan sistim pemerintahan dari presidensil kepada parlementer, 19 Agustus 1945 hingga 5 Juli 1959, telah menempatkan Sukarno sebagai kepala negara, dan kepala pemerintahan di pegang oleh perdana menteri yang bertanggungjawab kepada parlemen (DPRS). Sistim parlementer yang mengharuskan Perdana Menteri bertanggungjawab kepada parlemen, menyebabkan sering terjadi konflik antara parlemen dan pemerintah yang berahir dengan mosi tidak percaya terhadap pemerintah yang menyebabkan jatuhnya pemerintahan. Dalam sistem parlementer di Indonesia, jalannya pemerintahan tidak stabil sering terjadi konflik antar parlemen dan pemerintah yang menyebabkan umur suatu pemerintahan sangat pendek, sering terjadi pergantian pemerintahan.

Tidak stabilnya pemerintahan di era parlementer disebabkan karena tidak adanya kekuatan, partai yang mayoritas yang

mengusai parlemen. Dukungan untuk membentuk suatu pemerintahan baru didapat dengan cara berkoalisi dengan berbagai kekuatan partai, tidak adanya partai yang mayoritas menyebabkan beberapa partai koalisi mencabut dukungan dengan mengeluarkan mosi tidak percaya, maka pemerintahan akan jatuh. Ketidak stabilan pemerintahan menyebabkan pemerintah lambat dalam melaksanakan program pembangunan. Beberapa perwira yang tidak puas dengan keadaan politik dalam negeri yang tidak stabil akibat konflik kepentingan partai politik, pemerintahan berganti dalam waktu yang singkat, program pembangunan tidak dapat berjalan dengan baik.

Pada tanggal 1 April 1952 Wilopo, dilantik sebagai Perdana Menteri. Wilopo yang berasal dari Partai Nasional Indonesia (PNI), mendapat dukungan dari beberapa partai kemudian menyusun kabinet yang terdiri dari unsur PNI dan Partai Masyumi. Masing-masing partai pendukung mendapat kursi Menteri, Partai Katolik Republik Indonesia, Partai Kristen Indonesia, Partai Indonesia Raya, Partai Buruh dan Partai Syarikat Islam Indonesia, masing-masing mendapatkan satu jabatan menteri. Tiga kursi menteri dijabat oleh kelompok profesional (non partai) (Mobini-Kesheh, 1996).

Koalisi atau gabungan partai-partai politik untuk membentuk kabinet tidak didasarkan pada persamaan ideologi partai politik, tetapi kepada kepentingan politik sesaat. Keadaan ekonomi Indonesia di tahun 1952, mengalami kemunduran, pemerintah mengalami defisit Rp 9 milyar, salah satu faktor yang menyebabkan defisit ekonomi adalah selepas perang korea, *korea bom* berahir bertukar dengan *slump economy*. prodak ekspor strategis termasuk karet mengalami kejatuhan harga. Krisis ekonomi ini, menimbulkan frustrasi dikalangan masyarakat, yang tadinya memiliki harapan yang tinggi akan kemajuan Indonesia selepas perang kemerdekaan.

Untuk mengatasi krisis ekonomi Kabinet Wilopo, mengeluarkan kebijakan penghematan di berbagai bidang, salah satunya bidang pertahanan, dengan cara mempensunkan prajurit TNI, atau dikenal dengan istilah rasionalisasi dan profesionalisme prajurit. Kabinet Wilopo yang diisi kebanyakan dari unsur teknokrat, menghendaki agar melakukan modernisasi dan profesionalisasi tentera selepas perang kemerdekaan. Langkah yang diambil Kabinet Wilopo yaitu memanfaatkan *Nederlandse Militaire Missie (NMM)* atau misi militer Belanda, yang mengharuskan TNI, menerima bekas anggota KNIL untuk bergabung dengan TNI.

Rencana program profesionalisasi TNI, direspon sebagai sebuah ancaman oleh anggota TNI yang berasal dari PETA yang umumnya memiliki pendidikan kemiliteran moderen yang terbatas. Anggota TNI yang berasal dari PETA, seperti Kolonel Bambang Supeno, mencurigai, program profesionalisme kabinet Wilopo, akan menyebabkan demobilisasi ribuan anggota TNI yang berlatar belakang PETA, dan semakin memperkuat kedudukan tentera bekas KNIL dalam institusi TNI.

Perwira tentera yang tidak setuju dengan ide profesionalisme tentera seperti Mayor Bambang Superno, berusaha untuk mengagalkan program profesionalisme tentera. Tanpa izin dari Panglima Angkatan Darat, ia langsung bertemu dengan Presiden Sukarno dan anggota DPRS dari PNI, guna mencari dukungan. Mayor Bambang Superno membuat isu bahwa pemimpin Angkatan Darat yang mendukung profesionalisme tentera seperti Kolonel AH Nasution memiliki hubungan dekat dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), isu ini menyebabkan Presiden Soekarno yang berasal dari PNI dan anggota DPRS dari PNI, tidak mendukung rencana profesionalisme tentera, karena mencurigai ada kepentingan politik dibalik ide profesionalisme tentera.

Pimpinan Angkatan Darat Kolonel AH Nasution, menilai bahwa Mayor Bambang Superno melakukan kesalahan etika profesi karena bertemu dengan Presiden tanpa izin Kepala Staf Angkatan Darat. Atas tindakannya tersebut, KASAD kemudian memberi sanksi memberhentikan Bambang Sepeno dari jabatan untuk sementara waktu. Keputusan KASAD ini memunculkan banyak protes dari anggota parlemen yang berasal dari partai PNI. Mayor Bambang Supeno adalah perwira Angkatan Darat yang memiliki kedekatan dengan partai PNI.

Untuk mencari penyelesaian atas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh tentara, pada tanggal 28 Juli 1952, DPRS menyelenggarakan rapat dengan Kementerian Pertahanan dan Angkatan Bersenjata. Dalam rapat tersebut, anggota parlemen mengkritik kebijakan yang diambil oleh Kementerian Pertahanan, Menteri Pertahanan Hamengkubuwono IX dituduh oleh parlemen sebagai tokoh nasional yang pro terhadap Belanda, pernyataan anggota DPRS ini memunculkan kemarahan dari perwira tentara. Perwira tentara menilai tuduhan DPRS kepada Menteri Pertahanan, sebagai pro Belanda sebagai tindakan yang tidak tau malu, mengigat mayoritas anggota DPRS saat itu adalah orang federal, yang tidak ikut berjuang dalam mempertahankan kemerdekaan dari agresi Belanda.

Anggota DPRS menuduh Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubowono Ke IX, sebagai antek Belanda dan telah dikuasai oleh Partai Sosialis Indonesia. Atas tuduhan ini, Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubowono menampik dengan menyatakan *“tentara harus berkembang dengan tidak mencampuri soal-soal politik tapi sebaliknya mengharapkan pembicaraan di parlemen jangan menyebabkan terlibatnya tentara pada persoalan politik”* pernyataan Menteri Pertahanan merupakan suatu peringatan kepada DPRS bahwa tentara sudah siap melibatkan diri dalam politik jika perdebatan

di DPRS masih mencampuri persoalan internal tentara (Mkumbuzi, 2015).

Hubungan antara tentara dengan DPRS bertambah memanas saat anggota DPRS mengajukan mosi tidak percaya kepada pemerintah. Mosi tidak percaya DPR yaitu,

1. Mosi Zainul Baharuddin dan Ir Sakirman (PKI) yang mendesak pemerintah agar melakukan peninjauan kembali struktur organisasi Kementerian Pertahanan dan selekas mungkin dibuat undang undang pertahanan yang mengatur lebih lanjut kedudukan hukum setiap anggota Angkatan Perang. Mosi ini adalah mosi tidak percaya kepada kebijakan Menteri Pertahanan Sultan Hamengkubowono IX
2. Mosi I.J Kasimo (Katolik) dan M Natsir (Masyumi), yang mendesak segera diakhiri penggunaan Misi Militer Belanda (NMM) dan dibentuknya panitia untuk mengatur susunan baru organisasi Angkatan Perang

Mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh anggota DPRS dinilai oleh perwira tentara telah mencampuri urusan internal tentara. Perwira tentara mengadakan rapat untuk menolak mosi tidak percaya DPRS. Perwira tentara dibawah pimpinan Kolonel AH Nasution, mengirim surat protes kepada Presiden Sukarno sebagai Kepala Negara untuk menjaga TNI dari upaya intervensi politik DPRS.

Sikap Presiden Sukarno yang tidak memberi jawaban atas surat dari para perwira tentara, menyebabkan perwira tentara baik yang berasal dari PETA maupun KNIL bersatu dan melakukan pemberontakan kepada pemerintah. Pada 17 Oktober 1952 Kepala Staf Angkatan Darat Kolonel AH Nasution dan rombongan menemui Presiden Sukarno, sebelumnya Kolonel AH Nasution telah meminta ijin kepada Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubowono IX. Dalam pertemuan dengan Presiden Sukarno, KASAD Kolonel

AH Nasution menyampaikan petisi yang berisikan beberapa hal, antara lain,

1. Pertama, usia kabinet yang pendek hanya enam sampai delapan bulan hingga tidak satupun kabinet yang mampu melaksanakan program kerjanya
2. Kesulitan yang dihadapi oleh kabinet adalah menghadapi DPRS yang dua pertiga anggotanya berasal dari negara-negara boneka buatan Van Mook.
3. Ketiga agar Presiden / Panglima Tertinggi mengahiri parlemen yang sekarang dan membentuk DPR baru dalam waktu singkat dengan memperhatikan kehendak rakyat
4. Keempat Mosi Manai Sophiaan menurut pendapat tentara telah memasuki lapangan eksekutif. Hal ini dianggap berbahaya karena dapat mempolitisir tentara.

Sukarno menanggapi isi petisi dari para perwira tentara dengan tenang dan berpesan agar tentara jangan terpancing memasuki bidang politik, dan agar petisi tersebut tidak diumumkan "dalam waktu singkat Presiden akan membicarakan tuntutan tersebut dengan pemerintah (Perdana Menteri). Dan ia akan memperhatikan sejumlah suara dari luar Jakarta, termasuk kemungkinan menyelenggarakan pemilu.

Peristiwa 17 Oktober 1952 tidak hanya melibatkan TNI tetapi juga masyarakat yang melakukan demonstrasi di depan Istana mendukung langka tentara untuk membubarkan parlemen. Banyak penulis sejarah militer yang berpendapat aksi masa di depan Istana Negara direkayasa oleh tentara untuk memberi kesan bahwa aksi mereka mendapat dukungan rakyat.

Selepas bertemu dengan Kolonel AH Nasution, Presiden Sukarno menemui kelompok masa di depan Istana Negara, dan menyatakan dirinya tidak mau membubarkan DPRS karena dirinya tidak mau menjadi diktator. Sukarno menyatakan yang berdemonstrasi hanya rakyat di Jakarta,

tidak mewakili Indonesia, Presiden Sukarno akan meminta pendapat dari rakyat di luar Jakarta. Dalam negara demokrasi rakyat yang menyempurnakan parlemennya sendiri lewat pemilihan umum. Kemampuan Presiden Sukarno dalam berpidato memukau masa yang berdemo, mereka berbalik mendukung Presiden Sukarno, dengan berteriak "hidup Sukarno". Meriam yang dihadapkan ke Istana oleh Mayor Dr. Mustopa dan Mayor Kemal Idris tidak jadi ditembakkan.

Presiden Soekarno mendukung kelompok perwira tentara yang tidak setuju dengan pemberontakan tentara 17 Oktober 1952. Keadaan ini menyebabkan terjadinya kembali konflik di kalangan perwira TNI yang mendukung dan menentang Peristiwa 17 Oktober 1952. Pembicaraan antara Sukarno dan AH Nasution akhirnya bocor ke publik dan memojokkan AH Nasution. Biro Informasi Staf Angkatan Perang (BISAP) yang dikeluarkan oleh Kolonel Zulkifi Lubis, transkrip percakapan seolah-olah AH Nasution menekan Sukarno dengan Ancaman Kudeta.

Perwira TNI dari kelompok Kolonel Zulfifli Lubis yang telah lama menjadi rival Kolonel AH Nasution, menggunakan momen ini untuk menjatuhkan Kolonel AH Nasution dan kelompoknya. Kolonel AH Nasution mengakui dirinya bersalah dan bertanggungjawab atas terjadinya peristiwa tersebut. Untuk menjaga keutuhan TNI Kolonel AH Nasution mundur dari jabatan Kepala Staf Angkatan Darat, kemundurannya Kolonel AH Nasution diikuti oleh Mundurnya Sri Sultan Hamengkubono IX dari jabatan Menteri Petahanan.

Sampai saat ini, secara hukum tidak jelas siapa yang benar dan salah atas kasus ini, karena AH Nasution tidak pernah diadili di hadapan mahkamah militer. Partai Sosialis Indonesia (PSI) dituduh terlibat dalam peristiwa 17 Oktober 1952 itu dengan cara mempengaruhi perwira tentara untuk memberontak. PSI merupakan partai politik yang anggota politiknya berasal dari para intelektual Indonesia yang berpikiran maju



dan selalu bersikap kritis terhadap pemerintahan. PSI selalu mengangkat Isu Korupsi di kelompok pemerintahan. PSI juga mengambil sikap untuk tidak mendukung Amerika maupun Soviet (Feith, 1999, 343-344).

Para pemilihan umum tahun 1955 PSI mendapatkan suara hanya 2%. Hal ini dapat dipahami karena pemilih PSI banyak berasal dari kelompok intelektual yang di waktu itu sangat sedikit di Indonesia dari sebagian besar bertempat tinggal di perkotaan. Herbert Feith berpendapat bahwa Peristiwa 17 Oktober s 1952 sesungguhnya bukanlah usaha dari para perwira Angkatan Darat untuk mengambil kekuasaan pemerintahan. Peristiwa 17 Oktober terjadi akibat kekecewaan perwira TNI yang berpikiran profesional dan moderen, terhadap usaha-usaha dari pihak anggota parlemen yang menghalangi modernisasi dan profesionalisme TNI.

Dalam era tahun 50-an tentara belum memiliki kepemimpinan yang dapat menandingi pengaruh dan kharisma yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin sipil. Presiden Soekarno masih menjadi tokoh utama yang menjadi pelindung (patron) dari berbagai kekuatan politik di Indonesia, termasuk didalamnya kelompok perwira-perwira TNI.

## **PENUTUP**

Selepas revolusi kemerdekaan, bangsa Indonesia diperhadapkan dengan berbagai persoalan internal bangsa. Dalam tubuh TNI memunculkan berbagai faksi atau kelompok. Faksi dalam TNI sudah mulai muncul diawal pembentukan TNI. TNI yang berasal dari kelompok KNIL dan PETA, saling mencurigai satu dengan lainnya dan tidak saling percaya. Di Era tahun 1950 an, ketika revolusi fisik telah berahir, TNI mulai tergoda memasuki wilayah politik dan pemerintahan. Dalam era Sukarno, TNI di tempatkan dibawa supremasi pemerintahan sipil, militer berada dibawah kontrol

Pemerintah dan parlemen, TNI menilai anggota parlemen terlalu berlebihan dalam mengkritik bergaia kebijakan yang diambil oleh Menteri Pertahanan. Perwira TNI marah ketika parlemen menuduh Menteri Pertahanan meruapakan kaki tangan pemerintah Belanda karena Anggota parlemen menilai anggota DPRS yang sebenarnya orang-orang Belanda karena mereka berasal negara-negara boneka buatan Van Mook.

TNI di saat era Sukarno, tidak memiliki kesatuan komando yang kuat, banyak perwira TNI yang langsung membangun kedekatan dengan Preiden Sukarno, dengan jalur partai politik. Presiden Sukarno yang berasal dari partai PNI, menghendaki PNI memili 20 persen suara di DPR, Sukarno juga membangun pengaruh kedalam TNI. Peristiwa 17 Juli 1952, kurang mendapatkan simpati dari Sukarno Sukarno menolak mengikuti kehendak Kelompok AH Nasutin untuk membuarkan parkemen karena takut bertindak otoriter. Sukarno tidak mengikuti tuntutan.

Sukarno pada ahirnya juga memubaran juga DPR hasil pemilu. Presiden Sukarno dinilai tidak konsisten dengan pernyataan dekrit 5 Juli 1959. Sukarno membuarkan membuarkan konstituante yang merupakan hasil pemilu 1955. Pembubaran konstituante ini mendapatkan dukungan dari KASAD Kolonel AH Nasution.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Atno, A., & Utama, N. J. (2018). DARI RAKYAT UNTUK RAKYAT: BENIH, CIKAL-BAKAL, DAN KELAHIRAN TENTARA INDONESIA 1945-1947. *Journal of Indonesian History*, 7(1), 12-18.
- BANGUN, B. F. (2017). *DINAMIKA HUBUNGAN DIPLOMATIK CHINA-JEPANG PASCA MODERNISASI MILITER CHINA* (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).





- Fathurrohman, E. (2018). *Peranan Jenderal AH Nasution Dalam Peristiwa 17 Oktober 1952* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri" SMH" Banten).Indonesia, R. (2004).
- Mkumbuzi, W. P. (2015). Investment in employees and research and development and the signalling of intellectual capital by UK listed companies. *Asian Social Science*, 11(21), 148.
- Mobini-Kesheh, N. (1996). The Arab Periodicals of the Netherlands East Indies, 1914-1942. *Bijdragen tot de taal-, land-en volkenkunde/Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia*, 152(2), 236-256.